



► PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Padat Karya Sasar 29 Titik, Anggaran Rp2,9 Miliar

WATES-Program padat karya kembali digulirkan Pemkab Kulonprogo. Menggunakan anggaran Rp2,9 miliar yang bersumber dari APBD 2025, program ini menasar 29 wilayah dengan nilai Rp100 juta untuk tiap proyek.

Triyo Handoko
triyo@harianjogja.com

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulonprogo, Bambang Sutrisno, menyatakan jajarannya sudah menjalin kerja sama dengan pemerintah kalurahan yang menjadi sasaran dalam bentuk hibah. Nota kesepakatan hibah sudah ditandatangani pada Senin (20/1).

Dijelaskan Bambang Sutrisno, proyek padat karya bakal digelar mulai triwulan pertama tahun ini. "Untuk gelombang pertama akan dikerjakan di 20 titik, selanjutnya pada triwulan kedua sembilan titik," katanya saat dihubungi, Rabu (22/1).

Bambang menjelaskan, jajarannya sudah meninjau lokasi sasaran di 29 titik. "Peninjauan sudah dilakukan akhir

► Gelombang pertama menasar 20 titik, selanjutnya pada triwulan kedua sembilan titik.

► Tujuan utama program ini yakni mengentaskan kemiskinan dengan membuka lapangan kerja bagi pengangguran.

tahun lalu, sebelumnya pemerintah kalurahan juga sudah mengirim proposal pengajuan program padat karya ini," katanya.

Tidak seluruh kalurahan yang mengirim proposal diterima dan diberikan padat karya. Menurutnya, ada empat kriteria yang harus dipenuhi agar program padat karya bisa digelar di suatu wilayah, antara lain wilayah yang diajukan termasuk kantong kemiskinan, sebelumnya belum pernah menerima atau minimal proyek yang diajukan baru, lahan proyek berada dalam kewenangan pemerintah kalurahan bukan Pemkab Kulonprogo atau Pemda DIY, dan ada pertanggungjawaban proyek yang digarap sebelumnya.

Soal sasaran di wilayah kantong kemiskinan, Bambang menegaskan jajarannya memiliki data untuk diverifikasi. Data kemiskinan ini termasuk tingkat pengangguran

sehingga diharapkan program ini bisa mengurangi masalah pengangguran yang menjadi tujuan utama program ini.

Bentuk proyek padat karya, menurut Bambang, adalah pembangunan infrastruktur sederhana seperti pembangunan jalan desa, talut, dan drainase. "Tujuan utama program ini bukan semata-mata pembangunan infrastruktur, namun mengentaskan kemiskinan dengan membuka lapangan kerja bagi pengangguran," katanya.

Tujuan pemberdayaan masyarakat dibuktikan dengan pemberian hak pekerja yang laik sama seperti buruh lainnya. Ia menyebut perlindungan hak pekerja dalam proyek itu antara lain pemberian BPJS Ketenagakerjaan, tidak diperbolehkan kerja pada hari libur atau malam hari, hingga tidak boleh memotong honor masyarakat yang berpartisipasi dengan alasan apapun.

Di Bumi Binangun, program ini terbukti efektif menekan angka pengangguran terbuka yang kini menjadi yang terkecil di DIY. "Tingkat pengangguran terbukanya di Kulonprogo kini hanya tersisa 2,01 persen, dan berdasar kajian kami menunjukkan bahwa salah satu sebabnya karena adanya program padat karya yang tepat sasaran," katanya.